



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUMARDIYANTO
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
3. NHK : 923856

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.865.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 79 m2/258 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 320 m2/150 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HIBAH TANPA AKTA Rp. 365.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 152 m2/60 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **130.100.000**

1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA GL MT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 87.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 10.600.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 125 CC Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 15.500.000
4. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **600.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **300.130.333**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **2.295.830.333**



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.295.830.333

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.